NARASI DETAIL TIAP SLIDE

Fiscal Federalism Lanjut, Political Economy, dan Multilevel Spatial Governance

TPPWD Lanjut (S3) • Sesi 1 • Otonomi Daerah & Desentralisasi Fiskal

Prof. Dr. Ir. Bambang Juanda, M.S.
IPB University • 2026

Catatan Penggunaan

Dokumen ini merupakan narasi lisan untuk slide materi Sesi 1 TPPWD Lanjut (S3). Narasi mengikuti outline yang diberikan: first- dan second-generation fiscal federalism, subsidiarity/correspondence, political-administrative-fiscal decentralization, polycentric governance, asymmetric decentralization, local capture, institutional capacity, serta jembatan ke teori perencanaan dan desain riset doktoral.

Slide 1 — Fiscal Federalism Lanjut, Political Economy, dan Multilevel Spatial Governance

Narasi utama

Sesi pertama ini sengaja tidak mengulang kuliah S2 tentang definisi desentralisasi fiskal. Untuk mahasiswa S3, titik masuknya adalah mekanisme. Kita ingin memahami mengapa desentralisasi dapat meningkatkan welfare di satu wilayah, tetapi gagal di wilayah lain. Karena itu kita akan mempertemukan first-generation fiscal federalism yang menekankan efisiensi alokatif dan informational advantage dengan second-generation fiscal federalism yang menekankan insentif politik, commitment, rent seeking, dan institutional constraints. Pada akhir sesi mahasiswa diharapkan bukan hanya mampu menjelaskan teori, tetapi juga menyusun hipotesis dan mekanisme kausal yang dapat diuji secara empiris.

Penekanan saat mengajar: Tekankan bahwa fokus S3 adalah mechanism + heterogeneity + identification, bukan sekadar nomenklatur kebijakan.

Transisi: *Setelah memahami fiscal federalism lanjut, political economy, dan multilevel spatial governance, kita lanjut ke posisi sesi 1 dalam empat pertemuan s3.*

Slide 2 — Posisi Sesi 1 dalam Empat Pertemuan S3

Narasi utama

Empat sesi ini dirancang sebagai satu alur. Sesi 1 membangun teori dan mekanisme. Sesi 2 menerjemahkannya ke desain assignment dan equalization. Sesi 3 menurunkan unit analisis ke desa dan APBDes. Sesi 4 menjadi frontier research studio untuk menilai recentralization dan membangun strategi identifikasi empiris. Jadi sesi pertama menjadi fondasi konseptual: bila mekanismenya tidak jelas, desain transfer maupun studi empiris berikutnya akan mudah terjebak pada korelasi.

Penekanan saat mengajar: Tunjukkan bahwa sesi ini adalah jembatan dari teori perencanaan UTS menuju institusi dan insentif fiskal.

Transisi: *Setelah memahami posisi sesi 1 dalam empat pertemuan s3, kita lanjut ke capaian pembelajaran sesi 1.*

Slide 3 — Capaian Pembelajaran Sesi 1

Narasi utama

Capaian pembelajaran dirancang pada tiga tingkat. Pertama, konseptual: mahasiswa memahami dua generasi fiscal federalism. Kedua, analitis: mahasiswa dapat menilai apakah pembagian kewenangan sesuai benefit area, spillover, skala ekonomi, dan kapasitas institusi. Ketiga, riset: mahasiswa mampu mengubah teori menjadi mekanisme kausal dan pertanyaan empiris. Karena itu, setiap konsep akan selalu ditutup dengan pertanyaan: apa prediksinya, data apa yang dibutuhkan, dan faktor apa yang dapat memoderasi hubungan tersebut?

Penekanan saat mengajar: Arahkan mahasiswa sejak awal untuk berpikir dalam format theory → mechanism → hypothesis → evidence.

Transisi: *Setelah memahami capaian pembelajaran sesi 1, kita lanjut ke mengapa disebut fiscal federalism "lanjut"?.*

Slide 4 — Mengapa Disebut Fiscal Federalism "Lanjut"?

Narasi utama

Pada level doktoral, pertanyaan biner apakah desentralisasi baik atau buruk terlalu sederhana. Efek desentralisasi bersifat kondisional. Desain yang sama dapat menghasilkan outcome berbeda karena kapasitas birokrasi, struktur ekonomi, political competition, geografi, dan kualitas accountability berbeda. Selain itu, outcome yang kita nilai juga multidimensi: kualitas layanan, pertumbuhan, ketimpangan, inovasi, resilience, bahkan trust. Karena itu penelitian doktoral harus memeriksa heterogeneity dan spillover, bukan hanya average treatment effect atau koefisien rata-rata nasional.

Penekanan saat mengajar: Gunakan istilah 'conditional effects' dan 'context dependence' sebagai ciri analisis lanjut.

Transisi: *Setelah memahami mengapa disebut fiscal federalism "lanjut"?, kita lanjut ke peta konseptual sesi: theory → mechanism → institution → spatial outcome.*

Slide 5 — Peta Konseptual Sesi: Theory → Mechanism → Institution → Spatial Outcome

Narasi utama

Slide ini adalah peta berpikir yang akan dipakai sepanjang sesi. Teori memberi prediksi umum. Mekanisme menjelaskan proses yang menghubungkan desain dengan perilaku. Institusi menentukan aturan main dan kapasitas implementasi. Perilaku aktor—pemerintah, birokrasi, elite, warga, pelaku usaha—kemudian menghasilkan outcome yang tersebar tidak merata secara spasial. Dalam riset, kita harus menjaga agar tidak melompat dari teori langsung ke outcome. Misalnya, fiscal decentralization tidak otomatis meningkatkan growth; kita perlu menjelaskan apakah melalui local information, competition, better matching, atau justru rent seeking dan common-pool incentives.

Penekanan saat mengajar: Ini dapat menjadi kerangka DAG konseptual sebelum mahasiswa masuk ke model empiris.

Transisi: *Setelah memahami peta konseptual sesi: theory → mechanism → institution → spatial outcome, kita lanjut ke first- vs second-generation fiscal federalism.*

Slide 6 — First- vs Second-Generation Fiscal Federalism

Narasi utama

Perbedaan dua generasi ini sangat penting. First-generation fiscal federalism banyak berangkat dari pemerintah yang diasumsikan relatif benevolent dan berupaya memaksimalkan kesejahteraan. Problemnya adalah allocation: fungsi apa yang cocok di pusat dan apa yang cocok di daerah. Second-generation fiscal federalism menambahkan realism politik: pemerintah dan birokrasi merespons insentif; elite lokal dapat menangkap kebijakan; daerah dapat mengharapkan bailout; pusat dapat menggunakan transfer untuk tujuan politik. Karena itu desain institusi harus incentive-compatible, tidak hanya efisien secara teknis.

Penekanan saat mengajar: Jangan menempatkan generasi kedua sebagai pengganti generasi pertama; keduanya saling melengkapi.

Transisi: *Setelah memahami first- vs second-generation fiscal federalism, kita lanjut ke musgrave: tiga fungsi pemerintah dan implikasi desentralisasi.*

Slide 7 — Musgrave: Tiga Fungsi Pemerintah dan Implikasi Desentralisasi

Narasi utama

Kerangka Musgrave membantu kita memahami mengapa tidak semua fungsi fiskal sebaiknya didesentralisasikan. Fungsi allocation—penyediaan layanan lokal—paling kompatibel dengan desentralisasi karena preferensi dan kondisi lokal berbeda. Fungsi redistribution lebih sulit karena mobilitas penduduk dan basis pajak dapat mengganggu redistribusi lokal. Fungsi stabilization hampir selalu membutuhkan level nasional karena inflasi, suku bunga, dan siklus ekonomi tidak berhenti di batas daerah. Namun batasnya tidak absolut; misalnya daerah tetap punya peran dalam social assistance delivery atau countercyclical maintenance, tetapi instrumen utamanya tetap nasional.

Penekanan saat mengajar: Gunakan kerangka ini untuk menghindari slogan ‘semua harus didesentralisasikan’.

Transisi: *Setelah memahami musgrave: tiga fungsi pemerintah dan implikasi desentralisasi, kita lanjut ke oates’ decentralization theorem: intuisi dan syarat.*

Slide 8 — Oates’ Decentralization Theorem: Intuisi dan Syarat

Narasi utama

Decentralization theorem memberi argumen klasik: jika preferensi berbeda antarwilayah dan tidak ada skala ekonomi atau spillover besar, penyediaan layanan yang disesuaikan secara lokal dapat meningkatkan welfare dibanding satu standar seragam. Tetapi theorem ini sangat kondisional. Ia mengasumsikan kapasitas lokal cukup, pemerintah lokal responsif, dan spillover terbatas. Pada wilayah terpencil dengan kapasitas rendah, atau untuk layanan yang membutuhkan jaringan skala besar, desentralisasi penuh dapat justru tidak efisien. Karena itu theorem harus dibaca sebagai conditional proposition, bukan resep universal.

Penekanan saat mengajar: Minta mahasiswa menyebutkan satu contoh layanan yang memenuhi asumsi theorem dan satu yang tidak.

Transisi: *Setelah memahami oates' decentralization theorem: intuisi dan syarat, kita lanjut ke tiebout sorting: "voting with feet" dan batas realitasnya*.

Slide 9 — Tiebout Sorting: "Voting with Feet" dan Batas Realitasnya

Narasi utama

Model Tiebout menunjukkan bahwa bila rumah tangga dapat memilih yurisdiksi sesuai paket pajak-layanan, kompetisi antardaerah dapat mengungkap preferensi dan mendorong efisiensi. Tetapi dalam konteks Indonesia dan banyak negara berkembang, asumsi ini kuat: mobilitas tidak bebas, informasi tidak sempurna, pilihan wilayah tidak simetris, dan pekerjaan, keluarga, lahan, serta identitas sosial membatasi perpindahan. Karena itu Tiebout lebih berguna sebagai benchmark untuk memikirkan competition dan sorting daripada deskripsi literal realitas.

Penekanan saat mengajar: Hubungkan dengan suburbanization, migration, dan kompetisi layanan antarwilayah; jangan dibaca terlalu literal.

Transisi: *Setelah memahami tiebout sorting: "voting with feet" dan batas realitasnya, kita lanjut ke kapan first-generation logic bisa gagal?*.

Slide 10 — Kapan First-Generation Logic Bisa Gagal?

Narasi utama

Empat kondisi ini menjelaskan mengapa local information saja tidak cukup. Spillover tinggi menimbulkan under-provision karena daerah tidak memperhitungkan manfaat ke tetangga. Economies of scale tinggi membuat fragmentasi mahal. Capacity rendah berarti pemerintah lokal mungkin mengetahui masalah tetapi tidak mampu merancang atau mengeksekusi solusi. Accountability lemah membuka ruang capture. Dengan kata lain, proximity bukan jaminan efficiency. Di sinilah kita membutuhkan second-generation political economy.

Penekanan saat mengajar: Tekankan bahwa 'local' tidak selalu berarti 'better'.

Transisi: *Setelah memahami kapan first-generation logic bisa gagal?, kita lanjut ke second-generation fiscal federalism: fokus pada insentif*.

Slide 11 — Second-Generation Fiscal Federalism: Fokus pada Insentif

Narasi utama

Generasi kedua memulai analisis dari insentif. Setiap desain fiskal membagi manfaat, biaya, informasi, dan kewenangan. Jika manfaat lokal tetapi biaya tersebar nasional, permintaan belanja dapat berlebihan. Jika daerah yakin pusat akan menyelamatkan kewajibannya, disiplin fiskal melemah. Jika elite lokal menguasai informasi dan partisipasi lemah, otonomi dapat memperkuat capture. Jadi pertanyaan desain berubah dari 'siapa paling tahu?' menjadi 'insentif apa yang diciptakan oleh pembagian kewenangan dan pembiayaan ini?'

Penekanan saat mengajar: Ajak mahasiswa membaca kebijakan sebagai incentive system, bukan hanya struktur organisasi.

Transisi: *Setelah memahami second-generation fiscal federalism: fokus pada insentif, kita lanjut ke accountability chain: dari warga ke outcome.*

Slide 12 — Accountability Chain: Dari Warga ke Outcome

Narasi utama

Akuntabilitas adalah rantai. Warga memberi mandat kepada pemerintah daerah; pemerintah mengendalikan birokrasi; birokrasi mengontrak atau mengelola provider; provider menghasilkan layanan; outcome kembali dirasakan warga. Desentralisasi dapat memperpendek rantai tertentu, tetapi juga dapat menambah principal-agent problems bila peran tidak jelas. Misalnya pusat menetapkan standar, daerah membiayai, provider semi-otonom melaksanakan, dan warga tidak tahu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Karena itu clarity of assignment sama pentingnya dengan jumlah dana.

Penekanan saat mengajar: Hubungkan dengan pertanyaan: siapa merencanakan, siapa membayar, siapa melaksanakan, siapa diperiksa?

Transisi: *Setelah memahami accountability chain: dari warga ke outcome, kita lanjut ke common-pool problem.*

Slide 13 — Common-Pool Problem

Narasi utama

Common-pool problem muncul ketika aktor lokal memperoleh manfaat yang relatif terkonsentrasi tetapi tidak menanggung seluruh biaya marginal. Karena sebagian biaya dibagi ke pembayar pajak nasional, setiap daerah terdorong meminta lebih banyak. Secara kolektif perilaku rasional lokal dapat menghasilkan tekanan fiskal nasional. Ini tidak berarti transfer salah; justru desain formula, co-financing, hard budget constraint, dan transparansi biaya diperlukan agar permintaan lokal tetap disiplin.

Penekanan saat mengajar: Gunakan contoh proyek pusat di daerah atau permintaan tambahan transfer; fokus pada struktur insentif, bukan menyalahkan daerah.

Transisi: *Setelah memahami common-pool problem, kita lanjut ke soft budget constraint dan ekspektasi bailout.*

Slide 14 — Soft Budget Constraint dan Ekspektasi Bailout

Narasi utama

Soft budget constraint adalah situasi ketika pemerintah daerah memperkirakan batas anggaran tidak benar-benar mengikat karena pusat pada akhirnya akan menutup kekurangan, menyelamatkan BUMD, atau memberi transfer tambahan. Masalah utamanya adalah ekspektasi. Bahkan sebelum bailout terjadi, perilaku dapat berubah. Untuk mengatasinya, aturan harus kredibel, transparan, dan konsisten. Namun hard budget constraint juga tidak boleh buta terhadap shock eksogen atau underfunded assignment; bantuan pusat tetap dapat dibenarkan bila daerah mengalami bencana atau mandate tanpa funding.

Penekanan saat mengajar: Bedakan bailout karena mismanagement dengan dukungan karena shock atau unfunded mandate.

Transisi: *Setelah memahami soft budget constraint dan ekspektasi bailout, kita lanjut ke local capture dan elite capture.*

Slide 15 — Local Capture dan Elite Capture

Narasi utama

Salah satu kritik paling penting terhadap desentralisasi adalah capture. Local capture terjadi ketika proses keputusan lokal dikuasai kelompok yang memiliki sumber daya, jaringan, atau informasi lebih kuat. Karena itu participatory planning tidak otomatis egaliter. Musyawarah dapat didominasi aktor tertentu. Desain institusi perlu mempertimbangkan transparansi, akses informasi, representasi kelompok rentan, kompetisi politik, audit sosial, dan mekanisme grievance. Bagi riset doktoral, capture dapat diperlakukan sebagai mediator atau moderator antara desentralisasi dan outcome.

Penekanan saat mengajar: Hubungkan dengan planning theory: advocacy/collaborative planning berusaha mengatasi asymmetry of voice.

Transisi: *Setelah memahami local capture dan elite capture, kita lanjut ke institutional capacity sebagai moderator.*

Slide 16 — Institutional Capacity sebagai Moderator

Narasi utama

Efek desentralisasi sangat mungkin bergantung pada institutional capacity. Secara empiris, ini berarti kapasitas bukan hanya outcome atau mediator; ia bisa menjadi moderator. Desentralisasi pada daerah berkapasitas tinggi dapat meningkatkan responsivitas, sementara di daerah berkapasitas rendah efeknya lemah atau negatif. Ini membuka peluang model interaction atau threshold. Tetapi pengukuran kapasitas sulit: apakah menggunakan kualitas belanja, audit, staffing, digital maturity, atau indikator komposit? Pertanyaan pengukuran ini penting bagi disertasi.

Penekanan saat mengajar: Tunjukkan kemungkinan hubungan non-linear: manfaat desentralisasi muncul setelah melewati capacity threshold.

Transisi: *Setelah memahami institutional capacity sebagai moderator, kita lanjut ke subsidiarity sebagai problem of scale.*

Slide 17 — Subsidiarity sebagai Problem of Scale

Narasi utama

Subsidiarity sering disederhanakan menjadi ‘serahkan ke level paling bawah’. Itu tidak tepat. Prinsipnya adalah tempatkan fungsi pada level terendah yang mampu melaksanakannya secara efektif sambil menginternalisasi manfaat dan biaya. Karena itu kita perlu menilai benefit area, economies of scale, spillover, capacity, dan accountability. Fungsi dapat berbeda level antara daerah

padat, kepulauan, metropolitan, dan pedalaman. Ini memberi argumen teoritis bagi asymmetric atau differentiated assignment.

Penekanan saat mengajar: Subsidiarity bukan slogan anti-pusat; ia adalah rule for choosing scale.

Transisi: *Setelah memahami subsidiarity sebagai problem of scale, kita lanjut ke correspondence principle dan spillover.*

Slide 18 — Correspondence Principle dan Spillover

Narasi utama

Correspondence principle menekankan kesesuaian antara wilayah yang menerima manfaat, wilayah yang membayar, dan wilayah akuntabilitas. Bila manfaat lintas kabupaten tetapi pembiayaan hanya satu kabupaten, akan terjadi under-provision. Bila biaya dibiayai nasional tetapi manfaat sangat lokal, common-pool problem meningkat. Desain transfer dapat membantu mengoreksi mismatch ini melalui matching grants atau specific grants, tetapi transfer tidak menggantikan kebutuhan koordinasi antaryurisdiksi.

Penekanan saat mengajar: Gunakan contoh DAS, transportasi metropolitan, rumah sakit rujukan, atau pengelolaan sampah regional.

Transisi: *Setelah memahami correspondence principle dan spillover, kita lanjut ke political–administrative–fiscal decentralization: tiga dimensi.*

Slide 19 — Political–Administrative–Fiscal Decentralization: Tiga Dimensi

Narasi utama

Desentralisasi memiliki sedikitnya tiga dimensi. Political decentralization menyangkut representasi dan pilihan lokal. Administrative decentralization menyangkut organisasi dan kemampuan implementasi. Fiscal decentralization menyangkut sumber penerimaan, transfer, belanja, dan pembiayaan. Efek kebijakan bergantung pada konsistensi ketiganya. Misalnya kepala daerah dipilih dan memegang tanggung jawab layanan, tetapi sumber daya fiskal sangat earmarked; political accountability tetap lokal tetapi fiscal discretion rendah. Sebaliknya transfer besar tanpa administrative capacity dapat menghasilkan rendahnya kualitas belanja.

Penekanan saat mengajar: Ajarkan mahasiswa untuk tidak mengukur ‘desentralisasi’ hanya dengan satu rasio fiskal.

Transisi: *Setelah memahami political–administrative–fiscal decentralization: tiga dimensi, kita lanjut ke mismatch antar-dimensi: empat pola masalah.*

Slide 20 — Mismatch antar-Dimensi: Empat Pola Masalah

Narasi utama

Slide ini mengubah tiga dimensi tadi menjadi diagnosis. Underfunded decentralization terjadi saat tanggung jawab besar tetapi sumber daya atau diskresi kecil. Dana tinggi tetapi kapasitas rendah menghasilkan masalah absorpsi dan kualitas, bukan sekadar kurang uang. Diskresi tinggi tanpa

accountability meningkatkan risiko capture. Standar pusat dengan implementasi lokal dapat efektif bila koordinasi dan accountability jelas, tetapi dapat menjadi fragmented governance bila aturan saling tumpang tindih. Empat pola ini dapat digunakan sebagai typology untuk comparative case studies.

Penekanan saat mengajar: Dorong mahasiswa membangun typology sebelum memilih model empiris.

Transisi: *Setelah memahami mismatch antar-dimensi: empat pola masalah, kita lanjut ke multilevel governance: bukan hierarki tunggal.*

Slide 21 — Multilevel Governance: Bukan Hierarki Tunggal

Narasi utama

Pembangunan wilayah tidak berlangsung dalam satu rantai komando. Banyak isu dikerjakan melalui multilevel governance: pusat menetapkan standar atau menyediakan pembiayaan, provinsi mengkoordinasikan spillover regional, kabupaten melaksanakan, desa menyediakan local information, sementara swasta dan civil society ikut menentukan outcome. Karena itu desain desentralisasi perlu memperhatikan horizontal coordination dan vertical coordination sekaligus. Kegagalan sering bukan karena kewenangan salah tempat, tetapi karena hubungan antarlevel tidak memiliki aturan koordinasi yang kredibel.

Penekanan saat mengajar: Jelaskan perbedaan government versus governance: aktor non-pemerintah ikut membentuk hasil.

Transisi: *Setelah memahami multilevel governance: bukan hierarki tunggal, kita lanjut ke polycentric governance: banyak pusat keputusan, satu masalah.*

Slide 22 — Polycentric Governance: Banyak Pusat Keputusan, Satu Masalah

Narasi utama

Polycentric governance menekankan bahwa beberapa pusat keputusan dapat bekerja secara relatif otonom tetapi saling menyesuaikan. Ini relevan untuk wilayah metropolitan, DAS, pariwisata lintas kabupaten, atau pengelolaan sumber daya bersama. Polycentricity dapat mendorong experimentation dan learning, tetapi juga dapat meningkatkan transaction costs dan fragmentation. Jadi pertanyaan akademiknya bukan apakah polycentricity selalu baik, melainkan kondisi apa yang membuat koordinasi horizontal berhasil.

Penekanan saat mengajar: Hubungkan dengan Ostrom sebagai perluasan diskusi governance di luar fiscal federalism klasik.

Transisi: *Setelah memahami polycentric governance: banyak pusat keputusan, satu masalah, kita lanjut ke asymmetric decentralization: one size does not fit all.*

Slide 23 — Asymmetric Decentralization: One Size Does Not Fit All

Narasi utama

Asymmetric decentralization berangkat dari heterogenitas. Jika kapasitas, geografi, sejarah, dan pola spillover berbeda, uniform assignment belum tentu efisien. Asimetri dapat memperbaiki institutional fit, tetapi juga berisiko menciptakan bargaining asymmetry, ketidakpastian, atau persepsi ketidakadilan. Karena itu kita harus membedakan asymmetry yang berbasis fungsi dan kebutuhan dari asymmetry yang murni hasil bargaining politik. Untuk riset, Otsus atau status khusus dapat menjadi natural institutional variation, tetapi identification harus hati-hati karena daerah penerima tidak dipilih secara random.

Penekanan saat mengajar: Asimetri adalah respons terhadap heterogenitas, bukan otomatis privilege.

Transisi: *Setelah memahami asymmetric decentralization: one size does not fit all, kita lanjut ke planning theory bridge: rational vs collaborative/advocacy planning.*

Slide 24 — Planning Theory Bridge: Rational vs Collaborative/Advocacy Planning

Narasi utama

Sesi ini perlu kembali terhubung dengan materi UTS. Rational planning sejalan dengan kecenderungan merancang formula transfer, standar biaya, dan assignment secara teknokratik. Collaborative dan advocacy planning mengingatkan bahwa keputusan tersebut memiliki distribusi manfaat dan kekuasaan; data tidak otomatis netral. Di sisi lain, partisipasi juga dapat ditangkap elite. Untuk desain kebijakan, kombinasi keduanya lebih realistis: evidence-based rules plus institutionalized deliberation dan accountability.

Penekanan saat mengajar: Ini titik penting agar materi desentralisasi tidak terasa terpisah dari teori perencanaan.

Transisi: *Setelah memahami planning theory bridge: rational vs collaborative/advocacy planning, kita lanjut ke causal mechanisms: desentralisasi → outcome.*

Slide 25 — Causal Mechanisms: Desentralisasi → Outcome

Narasi utama

Tidak ada satu jalur tunggal dari desentralisasi ke outcome. Ada mekanisme positif dan negatif yang dapat berjalan bersamaan. Local information dapat meningkatkan matching. Competition dapat mendorong innovation. Participation dapat memperkuat accountability. Tetapi capture dapat meningkatkan rent seeking, dan common-pool incentives dapat memperburuk disiplin fiskal. Tugas penelitian adalah mengidentifikasi mekanisme mana yang dominan pada konteks tertentu. Karena itu koefisien rata-rata nasional tanpa analisis mekanisme sering kurang informatif.

Penekanan saat mengajar: Dorong mahasiswa menuliskan mediator dan moderator sebelum memilih variabel kontrol.

Transisi: *Setelah memahami causal mechanisms: desentralisasi → outcome, kita lanjut ke proposisi/hipotesis untuk riset doktoral.*

Slide 26 — Proposisi/Hipotesis untuk Riset Doktoral

Narasi utama

Slide ini menunjukkan bagaimana teori diterjemahkan menjadi hipotesis yang dapat diuji. H1 bersifat interaction hypothesis. H2 menempatkan spillover sebagai moderator. H3 menempatkan political competition sebagai institutional condition. H4 menghubungkan transfer dependency dengan political economy, bukan hanya rasio fiskal. H5 menguji institutional fit. Mahasiswa tidak harus menerima hipotesis ini; justru tugas S3 adalah memperdebatkan mekanismenya dan mencari alternatif prediction.

Penekanan saat mengajar: Bedakan hypothesis dari normative statement. Hipotesis harus dapat difalsifikasi.

Transisi: *Setelah memahami proposisi/hipotesis untuk riset doktoral, kita lanjut ke masalah identifikasi empiris yang harus diantisipasi.*

Slide 27 — Masalah Identifikasi Empiris yang Harus Diantisipasi

Narasi utama

Bahkan bila teori kuat, klaim kausal menghadapi masalah identifikasi. Pertumbuhan dapat meningkatkan PAD, bukan hanya sebaliknya. Daerah yang mendapat status khusus atau transfer tertentu dipilih karena karakteristik yang juga memengaruhi outcome. Spatial spillovers membuat asumsi independensi antarunit lemah. Ukuran fiscal decentralization juga sering problematik: share PAD, share expenditure, atau transfer dependency menangkap konsep berbeda. Karena itu penelitian S3 harus eksplisit mengenai estimand, treatment, counterfactual, dan ancaman validitas.

Penekanan saat mengajar: Slide ini hanya preview; toolkit metode akan didalami pada sesi 4.

Transisi: *Setelah memahami masalah identifikasi empiris yang harus diantisipasi, kita lanjut ke metode yang cocok dengan pertanyaan—bukan sebaliknya.*

Slide 28 — Metode yang Cocok dengan Pertanyaan—Bukan Sebaliknya

Narasi utama

Pesan metodologisnya sederhana: jangan mulai dari software atau teknik, lalu mencari pertanyaan. Mulailah dari teori dan mekanisme. Comparative institutional analysis cocok untuk membandingkan desain. Process tracing membantu memverifikasi mekanisme. Multilevel models relevan ketika data tersarang. Spatial models diperlukan bila spillover merupakan bagian teori. Indeks institusi dapat membantu, tetapi harus transparan secara konstruksi dan validitas. Pada sesi 4, kita akan masuk ke strategi kausal yang lebih formal.

Penekanan saat mengajar: Metode adalah konsekuensi dari research question dan data-generating process.

Transisi: *Setelah memahami metode yang cocok dengan pertanyaan—bukan sebaliknya, kita lanjut ke case lab: menentukan level pemerintahan.*

Slide 29 — Case Lab: Menentukan Level Pemerintahan

Narasi utama

Latihan ini meminta mahasiswa menggunakan empat kriteria—benefit area, economies of scale, spillover, dan institutional capacity—bukan mengandalkan intuisi atau daftar urusan. Jawaban dapat berbeda tergantung konteks. Misalnya pendidikan dasar dapat dikelola lokal dengan standar nasional; transportasi metropolitan membutuhkan koordinasi lintas kabupaten. Tujuannya bukan mencari satu jawaban benar, tetapi menunjukkan bagaimana assignment merupakan design problem.

Penekanan saat mengajar: Minta mahasiswa memberi alasan dan menyebutkan bentuk koordinasi jika fungsi tidak cocok pada satu level saja.

Transisi: *Setelah memahami case lab: menentukan level pemerintahan, kita lanjut ke debate prompt: desentralisasi atau recentralisasi?.*

Slide 30 — Debate Prompt: Desentralisasi atau Recentralisasi?

Narasi utama

Debat ini menghindarkan kita dari posisi ideologis. Sentralisasi standar dapat diperlukan untuk hak minimum warga. Local discretion diperlukan untuk respons terhadap heterogenitas. Pusat dapat terlibat lebih kuat ketika spillover besar, capacity sangat rendah, atau ada national externality, tetapi pengambilalihan implementasi harus diuji terhadap local information, duplication, dan accountability. Dengan demikian recentralization atau decentralization harus dinilai secara fungsional, bukan berdasarkan preferensi politik semata.

Penekanan saat mengajar: Gunakan sebagai diskusi terbuka 10–15 menit untuk melihat kemampuan argumentasi mahasiswa.

Transisi: *Setelah memahami debate prompt: desentralisasi atau recentralisasi?, kita lanjut ke doctoral research clinic: dari isu ke desain riset.*

Slide 31 — Doctoral Research Clinic: Dari Isu ke Desain Riset

Narasi utama

Pada akhir sesi, setiap mahasiswa sebaiknya mencoba satu ide riset. Mulai dari pertanyaan yang sempit dan substantif. Lalu nyatakan mekanisme teoretis. Turunkan menjadi hipotesis. Tentukan unit analisis—provinsi, kabupaten, desa, rumah tangga, atau organisasi. Identifikasi data yang realistis. Baru setelah itu pikirkan identification strategy. Terakhir, jelaskan kontribusi: apakah menambah teori, memperbaiki pengukuran, menunjukkan heterogeneity, atau memberi implikasi kebijakan baru.

Penekanan saat mengajar: Output ideal satu halaman concept note, bukan esai umum.

Transisi: *Setelah memahami doctoral research clinic: dari isu ke desain riset, kita lanjut ke contoh pertanyaan riset yang lebih tajam.*

Slide 32 — Contoh Pertanyaan Riset yang Lebih Tajam

Narasi utama

Pertanyaan-pertanyaan ini lebih tajam daripada ‘apakah desentralisasi berpengaruh terhadap pertumbuhan’. Setiap pertanyaan memuat kondisi atau mekanisme. Ini membuka desain empirical heterogeneity, interaction, threshold, atau comparative institutional analysis. Mahasiswa S3 sebaiknya menghindari judul yang terlalu luas dan berupaya mengidentifikasi kondisi kapan kebijakan bekerja.

Penekanan saat mengajar: Dorong mahasiswa memilih outcome yang spesifik dan mekanisme yang dapat diobservasi.

Transisi: *Setelah memahami contoh pertanyaan riset yang lebih tajam, kita lanjut ke ringkasan sesi 1.*

Slide 33 — Ringkasan Sesi 1

Narasi utama

Enam poin ini merangkum sesi. First-generation fiscal federalism memberi fondasi efisiensi. Second-generation menambahkan political economy. Subsidiarity membantu memilih skala yang tepat. Political, administrative, dan fiscal decentralization harus dibaca bersama. Capacity dan spillover membuat efek kebijakan heterogen. Akhirnya, penelitian doktoral harus menjelaskan mechanism dan identification, bukan hanya menunjukkan korelasi. Dengan fondasi ini, sesi 2 akan masuk pada fiscal assignment, equalization, dan territorial equity.

Penekanan saat mengajar: Gunakan slide ini untuk one-minute reflection sebelum penutup.

Transisi: *Setelah memahami ringkasan sesi 1, kita lanjut ke preview sesi 2 — fiscal assignment, equalization, dan territorial equity.*

Slide 34 — Preview Sesi 2 — Fiscal Assignment, Equalization, dan Territorial Equity

Narasi utama

Sesi berikutnya akan mengoperasionalkan teori ke desain hubungan fiskal. Kita akan membedakan need, capacity, space, dan autonomy; mengkaji DAU, DBH, DAK, dan transfer asimetris; serta menilai apakah desain transfer benar-benar mengurangi territorial inequality. Pertanyaan metodologis akan mulai lebih konkret: bagaimana mengukur cost disability, bagaimana menghindari endogeneity dalam capacity, dan bagaimana menilai spatial incidence.

Penekanan saat mengajar: Tutup dengan pertanyaan: equalization seharusnya menyetarakan apa? kapasitas, akses, atau outcome?

Transisi: *Setelah memahami preview sesi 2 — fiscal assignment, equalization, dan territorial equity, kita lanjut ke referensi utama.*

Slide 35 — Referensi Utama

Narasi utama

Daftar referensi menggabungkan teori klasik, political economy modern, polycentric governance, dan literatur desentralisasi pembangunan. Untuk pembacaan doktoral, mahasiswa sebaiknya tidak hanya membaca textbook tetapi membandingkan assumptions dan mechanisms antarpenulis. Regulasi Indonesia digunakan sebagai institutional context, bukan sebagai pengganti teori.

Penekanan saat mengajar: Anjurkan mahasiswa memilih minimal dua artikel/chapters dengan prediction yang berbeda untuk critical review.